

**ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Diploma IV (D - IV)
Politeknik Universitas Andalas*

Oleh

RJO SYANDRA

06 096 054



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



No. Alumni Universitas

Rio Syandra

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl.lahir: Painan, 07/07/1981 b). Nama Orang Tua: Syahrul dan Dra. Darwati c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096054 f). Tgl.Lulus: 24 Juli 2009 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h). IPK: 3,71 i) Lama Studi: 2 tahun 8 bulan j) Alamat orang tua: Jl. Sultan Hasanuddin Painan Selatan, Pesisir Selatan

**Analisis Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tugas Akhir D IV oleh Rio Syandra. Pembimbing 1.Amy Fontanella, SE. Ak., 2.Armel Yentifa, SE. Ak.**

ABSTRAK

Salah satu karakteristik *good public and good governance* adalah adanya akuntabilitas dan transparansi oleh pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas publik bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholder*) dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana LKPD dimanfaatkan oleh para pengguna khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah wawancara langsung dengan responden. Jawaban responden kemudian dicocokkan dengan jawaban yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu bagian dari pengguna laporan keuangan, memanfaatkan LKPD terutama Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil terutama yang menyangkut dengan evaluasi kinerja pemerintah dan penganggaran serta pengawasan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Juli 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Ferdawati, SE. M.Sc. Ak	Yosy Septriani, SE. M.Acc. Ak	Afridian Wirahadi, SE. Ak	Amy Fontanella, SE. Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak
Nama



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapatkan Nomor Alumnus:

Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan adanya reformasi terjadi pula berbagai perubahan disegala sektor tidak terkecuali dibidang sektor publik ataupun pemerintahan. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public and good governance*. *Good public and good governance* ini dapat diartikan sebagai pelayanan yang baik dan pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, *good governance* didefenisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi (Mardiasmo, 2002).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ada beberapa karakteristik yang mesti dipenuhi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) ada delapan karakteristik dalam pelaksanaan *good governance*. Diantaranya yaitu: keterlibatan masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, respon yang cepat dari pemerintah, orientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan terakhir memiliki pandangan ke depan (Mardiasmo, 2002).

Karakteristik akuntabel dan transparansi tercermin pada penyajian laporan keuangan. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari organisasi sektor publik tidak luput dari kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang pelaporannya dilakukan secara

tahunan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap akuntabilitas pemerintah tapi juga berfungsi untuk memberikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah itu sendiri.

Pada dasarnya, tujuan dan fungsi laporan keuangan pada sektor publik ada beberapa macam. Diantaranya adalah untuk pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan, perencanaan dan informasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, sumber fakta dan gambaran. Oleh karena itu pemerintah sebagai salah satu lembaga sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan tersebut mesti dipublikasikan. Menurut Mahmudi (2007), terdapat dua alasan penting mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangannya. Pertama bagi pemakai internal laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Kedua bagi pemakai eksternal laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu organisasi sektor publik yang menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakatnya tidak terlepas dari kewajiban untuk membuat laporan keuangan serta mempublikasikannya. Laporan Keuangan ini akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD dalam hal pengawasan dan anggaran. Seperti yang diketahui bahwa penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah

daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa pengguna laporan keuangan adalah:

1. masyarakat,
2. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa,
3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
4. pemerintah.

Secara umum masih banyak pihak yang beranggapan bahwa laporan keuangan pemerintah dibuat hanya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan saja dan berguna hanya bagi pemerintah saja. Dalam suatu studi yang dilakukan oleh Ilcena Steccolini (2007), laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah hanya bersifat formal untuk memenuhi kewajibannya saja, dan para pengguna eksternal bahkan tidak tertarik untuk mengetahui apa isi laporan keuangan pemerintah daerah apalagi untuk menggunakannya.

Sejauh yang penulis ketahui, untuk daerah Pesisir Selatan belum ada suatu penelitian yang membahas tentang pemanfaatan laporan keuangan pemda baik itu oleh pemda sendiri maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah Pesisir Selatan oleh para *stakeholder* khususnya oleh wakil rakyat/DPRD, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam suatu

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan objek penelitian pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sebagian anggotanya menjadi responden dalam penelitian yang menggunakan metode wawancara, diperoleh kesimpulan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen indikator kinerja pemerintah daerah. Selain itu LKPD juga digunakan merupakan sebagai dasar pertimbangan utama oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang menyangkut masalah penganggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan pengawasan.

Namun LKPD ini belum sepenuhnya dapat digunakan secara optimal oleh anggota DPRD karena hanya mempergunakan sebagian saja dari komponen-komponen penyusun LKPD. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD terhadap akuntansi pemerintahan.

Jika LKPD dapat digunakan secara optimal, seharusnya laporan keuangan bisa menjadi alat untuk memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya, kondisi ekonomi, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja pemerintah kesesuaiannya dengan peraturan dan kesepakatan, serta memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto. (2008). *Manfaat Informasi Akuntansi (Laporan Keuangan)*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2007). *Pesisir Selatan Dalam Angka*.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (2008). *Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*.
- Bastian, Indra. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi dan Halim. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Harahap, S. (2004). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007) *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan*.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsum, M., Sulistyawati, F., Purwanugraha, H. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2008, tentang *Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*.
- Purwanti. (2005). *Laporan Keuangan Instansi*. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Ratnawulan, Galuh. "Pemahaman Politisi Terhadap Anggaran dan Pelaporannya". Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Steccolini, Ileana (2002). *Local Government Annual Report: An Accountability Medium?* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik.